

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Performa yang baik dari pemerintah bisa diukur melalui laporan keuangan yang mereka hasilkan. Jika laporan keuangan disusun memenuhi standar yang ditetapkan dan tepat waktu dalam penyampaian, hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan pemerintah. Ini juga mencerminkan bahwa pemerintahan dijalankan secara baik, bertanggung jawab, dan demokratis (Tawaqal & Suparno, 2017).

Adapun terjadinya perubahan pengelolaan di sistem pemerintah daerah dari internal maupun eksternalnya yang mendorong akan diberlakukannya otonomi daerah. Jika otonomi daerah dilaksanakan maka pengelola keuangan sepenuhnya akan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam mengelola keuangan daerahnya pun harus tertib, transparansi, dan akuntabel untuk mewujudkan kepercayaan Masyarakat akan pemerintah yang bersih. Salah satu untuk mengetahui lebih lanjut apakah pemerintah mengelola keuangan daerah secara bersih maka pemerintahan daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan. Laporan keuangan daerah adalah alat yang cukup berpengaruh dalam menciptakan keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan pemerintah kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang memadai menjadi elemen keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, terutama pada pengelola anggaran secara efektif dan efisien (Nugraeni & Budiantara, 2015).

Tujuan utama dari sebuah laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi terkait hasil kegiatan operasional, arus kas, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, kondisi keuangan, serta perubahan modal suatu entitas. Informasi tersebut berguna bagi pengguna dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya (Tawaqal & Suparno, 2017). Apabila laporan keuangan yang dipresentasikan bernilai bermanfaat untuk merumuskan keputusan yang mendorong akselerasi pembangunan serta reduksi kemiskinan, maka kualitasnya terpenuhi. Indikator kualitas laporan keuangan tercermin dari opini audit Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengklasifikasikan hasil pemeriksaan ke dalam hierarki: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai level optimal, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)(Putriasri, 2017).

Tuntutan untuk akuntabilitas pada laporan keuangan di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengalami peningkatan. Yang disebabkan oleh kesadaran publik yang semakin tinggi akan pentingnya informasi mengenai penggunaan dana publik. Masyarakat ingin memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka, sebagai cara untuk menilai kinerja pemerintah selama periode tertentu. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat (Rahmi, 2021).

Fenomena lain terdapat pada penelitian Hendra Hafid Permadi et al. (2024) Terdapat kasus kualitas laporan keuangan pemerintah di Ds. Sukoharjo, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur yang menyatakan kondisi laporan keuangan untuk beberapa tahun terakhir yang cukup memprihatinkan. Dikarenakan pada laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum berhasil memiliki opini WTP dari BPK RI. Di tahun 2019 hingga tahun 2022 kualitas laporan keuangan pemerintahannya hanya mendapatkan opini WDP, dan di tahun 2020 kualitas laporannya mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) karena kualitas keuangan yang sangat buruk. Pada tahun 2021 akhirnya kualitas laporan keuangan pemerintah pada Desa Sukoharjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya, yang di hasilkan melalui kerja keras dan upaya yang maksimal. Namun opini WTP ini bisa menurun jika kinerja tidak dijaga dan tidak di pertahankan. Di sisi lain, Kabupaten Cirebon, memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas laporan keuangan daerahnya memenuhi standar yang ditetapkan

**Tabel 1. 1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Cirebon
2020 – 2025**

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Peningkatan kualitas laporan keuangan
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Stabilitas pengelolaan keuangan
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penguatan sistem akuntansi daerah
2023	WTP dengan Penekanan Suatu Hal	Tetap WTP, ada catatan khusus
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Konsistensi dan perbaikan berkelanjutan
2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Peningkatan Sistem pengendalian Internal

(Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/opini-lkpd/>)

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa opini BPK atas Laporan Keuangan di Kabupaten Cirebon di tahun 2020 mendapatkan opini WTP dengan ini faktanya Kabupaten Cirebon berhasil mempertahankan Opini WTP dalam jangka waktu enam tahun berturut-turut, menandakan kualitas laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi pemerintah, di tahun 2023 mendapatkan opini BPK yang disertai dengan penekanan suatu hal, dalam hal ini yang berarti ada catatan khusus dari BPK namun tidak mempengaruhi opini keseluruhan pada opini yang konsisten ini mencerminkan peningkatan dan stabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta implementasi sistem akuntansi yang efektif serta sebuah laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP berulang kali dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Cirebon. (Subekti, 2025).

Melalui penyajian laporan keuangan, publik dapat mengevaluasi cara pemerintah mengadministrasikan dan mengalokasikan anggaran tahunan, serta

menilai apakah penggunaannya selaras dengan prioritas masyarakat. Dengan demikian, laporan keuangan bermutu tinggi esensial untuk memastikan informasi yang disampaikan relevan dengan keperluan stakeholders publik. Dengan demikian, pemerintah sebagai pengelola kepercayaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan tersebut. Singkatnya, akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah sangat penting bagi masyarakat. Namun, meskipun Kabupaten Cirebon telah memperoleh opini WTP selama beberapa tahun, masih ditemukan kesalahan penganggaran dan kelemahan kompetensi SDM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan yang di hasilkan.

Di salah satu instansi Kabupaten Cirebon, terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja barang dan jasa mencapai Rp9.157.762.527, yang mengakibatkan ketidakselarasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya Lampiran II.03 Pernyataan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran serta Lampiran II.08 Pernyataan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. (Maulani, 2024). Fenomena yang didapatkan terkait kualitas penyajian laporan keuangan yang menjelaskan bahwa pada laporan keuangan di Kab. Cirebon belum optimal adapun di temukannya juga kesalahan penganggaran sebesar Rp. 54,3 Miliar di Rumah Sakit Umum Arjawinangun dan BPK Jabar melihat adanya kekurangan dalam pengendalian internal serta penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku saat memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Hal ini terlihat dari penilaian persediaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, sehingga menyebabkan penyajian nilai persediaan menjadi tidak akurat. Selain itu, pengelolaan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Cirebon juga masih belum memadai (<https://www.jabarpublisher.com/index.php/2022/12/16/>).

Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual bagi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

tepatnya Pasal 1 ayat 4 serta ayat 5.(Ramadhan & Fahrani, 2024). SAP ini bertujuan untuk mengembangkan keterbukaan, relevansi, dan reliabilitas laporan keuangan daerah. Namun, implementasi SAP sering kali menghadapi kendala teknis maupun kapabilitas SDM yang belum sempurna, sampai memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dikelola (Arista et al. 2023).

Penyusunan dan penyerahan laporan akuntabilitas pelaksanaan APBN atau APBD harus mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Administrasi Publik (SAP). Tujuannya memastikan kejelasan serta tanggung jawab dalam manajemen keuangan negara dan daerah, sesuai Pasal 31 ayat 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Audit dokumen ini dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan batas waktu penyelesaian enam bulan setelah akhir tahun anggaran. Komponen laporan keuangan wajib conforme standar SAP minimum, termasuk laporan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan (neraca), aliran kas, dan uraian catatan atas laporan keuangan. (Fazlurahman et al. 2021).

Kompetensi SDM muncul sebagai faktor kunci yang membentuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Humairoh, Ekonomi, & Unej n.d.). Keahlian serta kapabilitas personel di ranah akuntansi sangat dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan yang superior. Ironisnya, sejumlah besar pegawai negeri sipil masih kekurangan edukasi atau pelatihan khusus akuntansi, menyebabkan staf OPD sering gagal mematuhi standar pengelolaan keuangan daerah (Latifah, 2015). Penguasaan norma akuntansi pemerintahan dan profisiensi teknis oleh SDM berkontribusi pada peningkatan presisi serta reliabilitas laporan keuangan. Riset terdahulu mengonfirmasi dampak substansial kompetensi SDM terhadap mutu pelaporan keuangan daerah. (Taviana & Riharjo, 2020).

Dalam penelitian Ramadhan and Fahrani (2024) Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Variabel ini terbukti memiliki kontribusi substansial dalam meningkatkan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana didukung oleh studi-studi pendukung. Ikriyati & Aprila (2019). Peneliti Maulani (2024) juga telah melakukan penelitian dan mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara signifikan memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dalam memahami akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Arista et al. (2023) dan Taviana & Riharjo, (2020) juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang akuntansi pemerintahan akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Namun, berbeda dengan penelitian dari Hartati, Sutanto, & Fatimah (2024) pada penelitian tersebut ditemukan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya penerapan standar tersebut di lapangan, walaupun secara teori seharusnya mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan Kualitas laporan keuangannya. Beberapa catatan menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap penerapan SAP dan kompetensi SDM sebagai upaya perbaikan.

Berdasarkan penjelasan kerangka dan masalah di atas, maka hal ini dapat dilakukan riset lebih lanjut Untuk memperoleh output yang dapat dijadikan referensi dalam analisis perbandingan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah**

Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon”

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan dari penjelasan di atas yang sudah disampaikan sebelumnya, Masalah yang akan dibahas dalam kajian ini dapat dijabarkan melalui rumusan berikut:

1. Pelaksanaan Standar Akuntansi untuk Administrasi Publik yang sedang berlangsung di Kabupaten Cirebon telah menyebabkan dokumen keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dokumen keuangan tersebut masih diperlukan.
2. Kesalahan penyajian terus memengaruhi penyusunan anggaran dan pembuatan laporan keuangan, termasuk tidak adanya persamaan dalam pengeluaran dan aset tetap, yang menunjukkan kekurangan dalam praktik akuntansi lokal dan pengawasan internal.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam akuntansi publik masih kurang memadai, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan staf yang memiliki kualifikasi pendidikan akuntansi yang tidak memadai atau kurang pelatihan teknis yang diperlukan, yang berpotensi membahayakan kualitas dokumen keuangan.
4. Meskipun Kabupaten Cirebon menerima opini audit tanpa kualifikasi (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara), kekurangan dalam tata kelola keuangan dan pelanggaran standar akuntansi yang relevan masih ditemukan.
5. Terdapat kurangnya keseragaman dan pengawasan dalam memastikan kualitas laporan keuangan, yang dapat berdampak buruk pada transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang.

C. Pembatas Masalah

Sebagai akibat dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan berkonsentrasi semata-mata pada implementasi peraturan akuntansi untuk entitas pemerintah daerah serta keterampilan personel di wilayah Cirebon. Pembatasan fokus ini disebabkan oleh pengaruh hubungan antara penerapan peraturan akuntansi untuk pemerintah daerah dan keterampilan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas pemerintah daerah.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pemerintah daerah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang disusun?
2. Apakah tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah daerah berkontribusi terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan?
3. Apakah penerapan SAP dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk sejauh pada permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai:

- 1) Evaluasi sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di tingkat pemerintah daerah.
- 2) Penilaian pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap mutu laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Pengujian pengaruh bersama antara Standar Akuntansi Pemerintah serta kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Pada sebuah penelitian atau pembahasan mengenai suatu masalah, Diharapkan output dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkaitan atau memiliki minat dalam bidang ini dan memiliki kepentingan terhadap kasus yang diteliti dan dibahas. Beberapa pihak yang dimaksud antara lain:

a. Manfaat bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini akan memberikan dampak positif pada kemajuan ilmiah, khususnya dalam bidang akuntansi di sektor publik. Hasil penelitian ini bisa menjadi data penelitian atau landasan untuk investigasi tambahan yang berfokus pada penegakan standar akuntansi di sektor publik, pemanfaatan sistem teknologi informasi, dan peningkatan kemampuan karyawan, sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan keuangan di pemerintahan daerah.

b. Manfaat bagi Pemerintahan Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan manfaat berupa hasil berbasis bukti, khususnya untuk wilayah Cirebon, terkait peningkatan standar pelaporan keuangan dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip akuntansi administrasi publik. Lebih jauh lagi, penelitian ini menekankan pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi karyawan. Selain itu, hasil studi ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta penyajian keuangan dalam kerangka pemerintahan daerah.

c. Manfaat bagi Penulis

Hal ini dapat memperluas perspektif dan pemahaman penulis mengenai pengaruh penggunaan peraturan akuntansi bagi pemerintah daerah serta kemampuan sumber daya manusia dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Struktur skripsi penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon” disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang isu penelitian, rumusan masalah, identifikasi permasalahan, tujuan studi, serta manfaat yang diantisipasi..

BAB II KAJIAN PUSTAKA memaparkan teori-teori relevan terkait kualitas laporan keuangan daerah, tinjauan literatur serta studi pendahuluan, kerangka konseptual, dan hipotesis yang dirumuskan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN mendeskripsikan strategi penelitian yang direncanakan untuk menguji hipotesis, mencakup lokasi serta jadwal studi, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, jenis serta sumber data, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN menyajikan temuan dari pengolahan data menggunakan metode terpilih, diikuti analisis mendalam dan interpretasi.

BAB V PENUTUP merangkum kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis sebelumnya.